
EFEKTIVITAS PROGRAM BANTUAN PRODUKTIF USAHA MIKRO (BPUM) UMKM DI DISKOPERINDAG KABUPATEN SUMEDANG

Nazwa Nabila

Universitas Sebelas April

Article Info

Article history:

Received Mei 10, 2025

Revised Mei 31, 2025

Accepted Juni 18, 2025

Keywords:

Public Policy

Effectiveness

*Micro Business Assistance
Program*

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the effectiveness of the productive assistance program for micro businesses (BPUM) for MSMEs in Diskoperindag Sumedang Regency. The research method used in this study was purposive sampling. With research informants, namely the Secretary of the Service, Head of the MSME Division, Functional Section of Entrepreneurship Development, Functional Section. Data collection techniques used were literature studies and field studies consisting of observation, interviews, and documentation. While the data processing procedures in this study were data reduction, data display, data conclusion drawing/verification and triangulation. Based on the results of the study, it was concluded that the effectiveness of the BPUM UMKM program in the Sumedang Regency Trade and Industry Office has been implemented well, seen from the groups that have been successfully reached, data collection of target groups has been carried out according to what is expected, the time for program socialization has been considered good. However, there are still obstacles faced in the implementation of Micro-Business Productive Assistance in Sumedang Regency, namely, from the program organizers so that there are still deviations, at the time of socialization there is unclear information conveyed, the program targets are not quite right and from the economic aspect the targets run effectively. There are efforts to overcome obstacles in the effectiveness of the Micro-Business Productive Assistance program, namely by conducting socialization carried out by program organizers so that understanding of BPUM UMKM runs optimally, and as much as possible by providing and improving what is inhibiting it.



Copyright © 2025 JRPA. All rights reserved.

Corresponding Author:

Nazwa Nabila

Program Studi Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik

Universitas Sebelas April

Jl. Angkrek Situ No. 19 Sumedang

Email: nazwanab@gmail.com

1. INTRODUCTION

Pembangunan nasional yang mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa diselenggarakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Masyarakat disini menjadi pelaku utama pembangunan, dan pemerintah berkewajiban mengarahkan, membimbing dan melindungi, serta menumbuhkan suasana dan iklim yang menunjang. Didasarkan atas kondisi tersebut, pemerintah pada tahun 2009 merencanakan tahun industri kreatif yang diyakini merupakan industri penggerak sektor riil ditengah ancaman melambatnya perekonomian akibat krisis global. Melalui Instruksi Presiden No.6 Tahun 2009 mengenai pengembangan industri kreatif kepada 28 instansi pemerintah pusat dan daerah untuk mendukung kebijakan pengembangan industri kreatif tahun 2009-2015 yakni pengembangan kegiatan ekonomi berdasarkan pada kreatifitas, keterampilan, bakat individu yang bernilai ekonomi dan berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pengertian UMKM adalah sebuah bisnis yang dioperasikan oleh pelaku usaha secara individu, rumah tangga, ataupun badan usaha berskala kecil. Dalam Bab 1 (Ketentuan Umum), Pasal 1 dari undang-undang tersebut dinyatakan bahwa, usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari perusahaan menengah atau besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Sedangkan usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam perekonomian Indonesia mempunyai peran dan potensi yang besar dalam membangun perekonomian nasional maupun sektoral. Beberapa peran strategi UMKM adalah ikut serta dalam proses pemerataan pembangunan ekonomi, menciptakan kesempatan berusaha serta menciptakan dan memperluas lapangan kerja sehingga mampu menyerap tenaga kerja yang banyak.

Program bantuan pemerintah yang diberikan kepada pelaku usaha mikro merupakan Program Bantuan Langsung (BLT) bagi UMKM yang dikenal dengan nama Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM). BPUM merupakan bantuan pemerintah dalam bentuk uang yang diberikan kepada pelaku usaha mikro yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Program BPUM diberikan kepada pelaku usaha mikro untuk menjalankan usaha dan memperkuat ketahanan bisnis UMKM. BPUM diberikan kepada pelaku usaha mikro yang telah memenuhi persyaratan dan tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan dari perbankan. Tujuan direalisasikannya program BPUM diantaranya adalah untuk memperkuat ketahanan bisnis UMKM. Dalam program ini, setiap pelaku usaha akan mendapatkan bantuan sebesar Rp 2,4 juta. Bantuan ini khusus diberikan kepada pelaku usaha yang tidak menerima modal kerja dan investasi perbankan (unbankable). Syarat-syarat UMKM untuk menerima BPUM yaitu: penerima bantuan adalah Warga Negara Indonesia (WNI), memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), bukan Aparatur Sipil Negara (ASN), bukan anggota TNI dan POLRI, bukan pegawai aktif di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Tabel 1. Data Penerima Bantuan UMKM di DISKOPERINDAG Kabupaten Sumedang

NO	BULAN/TAHUN	JUMLAH UMKM
1	Oktober 2021	21.406
2	November 2021	25.411

Sumber : Diskoperindag Kabupaten Sumedang 2021

Berdasarkan tabel 1. dapat dijelaskan bahwa Data Penerima Bantuan UMKM di Diskoperindag Kabupaten Sumedang untuk bulan Oktober 2021 sebanyak 21.406 UMKM Sedangkan untuk bulan November 2021 sebanyak 25.411 UMKM. Pembinaan UMKM di Kabupaten Sumedang merupakan wewenang yang dilakukan oleh DISKOPERINDAG dan UKM Kabupaten Sumedang, dan mempunyai tujuan secara umum untuk menjadikan UMKM sebagai pelaku ekonomi utama dalam perekonomian yang berdaya saing. Dengan hal ini, DISKOPERINDAG dan UKM Kabupaten Sumedang dalam bidang UMKM mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan tugas-tugas pada bidang usaha pertanian, usaha non pertanian, perdagangan dan aneka usaha. Serta mempunyai tugas fungsi sebagai berikut: Penyusunan kebijakan teknis bidang; Penyelenggaraan program dan kegiatan bidang; Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan

kegiatan kepala seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup bidang: Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup bidang.

Pembinaan UMKM yang dilakukan oleh DISKOPERINDAG dan UKM Kabupaten Sumedang yaitu melalui kegiatan pelatihan-pelatihan kepada pelaku UMKM. Dengan hal ini, tujuan dari adanya pembinaan tersebut dapat menghasilkan perubahan ke arah yang lebih baik dari sebelumnya, pelaksanaan ini diawali dengan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pembiayaan, koordinasi, pelaksanaan, dan pengawasan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan dengan hasil yang lebih baik.

Namun berdasarkan observasi awal dilapangan, peneliti melihat adanya indikasi atau fenomena masalah yang berkaitan dengan Efektivitas Program Bantuan Usaha Mikro (BPUM) UMKM di Diskoperindag Kabupaten Sumedang dengan indikasi atau fenomena masalah sebagai berikut:

1. Kurangnya ketepatan sasaran dalam pendataan kelompok yaitu adanya duplikasi penyaluran BPUM kepada satu penerima. Hal ini dikarenakan pengelolaan data-data calon penerima bantuan dilihat dari aspek pengetahuan petugas pendata masih rendah. Selain itu pendata kurang mendapatkan pelatihan ataupun bimbingan teknis mengenai panduan teknis pendataan tersebut. Masalah ini sejalan dengan data yang tertuang dalam lampiran data Rencana Strategis (RENSTRA) Diskoperindag Kabupaten Sumedang pada BAB III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah Berdasarkan tugas pokok dan fungsi halaman 62-63.
2. Belum optimalnya tujuan program karena terbatasnya pelaku usaha untuk mendapatkan akses permodalan. Hal ini karena anggaran yang diberikan oleh pemerintah tidak sebanding dengan UMKM yang ada di Kabupaten Sumedang. Masalah ini sejalan dengan data yang tertuang dalam lampiran data Rencana Strategis (RENSTRA) Diskoperindag Kabupaten Sumedang pada BAB III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah Berdasarkan tugas pokok dan fungsi halaman 62-63.
3. Kurangnya pemantauan program penerima Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM), kepada pelaku UMKM yang teridentifikasi sedang menerima kredit atau pinjaman perbankan. Hal ini dibuktikan pada saat proses pencairan, nomor NIK penerima tercatat sebagai penerima kredit di bank.

Adapun fokus pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Efektivitas Program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) UMKM di Diskoperindag Kabupaten Sumedang;
2. Faktor yang menghambat efektivitas program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) UMKM di Diskoperindag Kabupaten Sumedang; dan
3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam efektivitas program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) UMKM di Diskoperindag Kabupaten Sumedang.

2. METHOD

Dalam penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif atau sering disebut dengan metode naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*Natural Setting*) dan hasil dari penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna daripada generasi. Penelitian kualitatif yaitu penelitian dengan menggunakan riset yang bersifat deskriptif dan menggunakan analisis. Perspektif subjek lebih ditonjolkan ketika menggunakan penelitian kualitatif. Landasan teori bisa dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Menurut Sugiyono (2017: 9) mengemukakan bahwa metode penelitian kualitatif adalah Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) Dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data dan sifat induktif, kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Sedangkan menurut Bogdan dan Taylor (Moleong 2012: 4) mengemukakan bahwa “metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati”

Menurut Sugiyono (2018: 297), Subjek penelitian adalah pihak yang berkaitan dengan yang diteliti untuk mendapatkan informasi terkait data penelitian yang merupakan sampel dari sebuah penelitian. Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber, atau partisipan, informan. Sampel dalam penelitian kualitatif, juga bukan disebut sampel statistic, tetapi sampel teoritis, karena tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menghasilkan teori. Teknik yang digunakan dalam menentukan subjek penelitian adalah Teknik Purposive sampling. Menurut Sugiyono (2018: 301), purposive sampling adalah Teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti. Informan penelitian adalah seseorang yang memiliki informasi mengenai objek penelitian tersebut. Informan dalam penelitian ini yaitu berasal dari

dari wawancara langsung yang disebut sebagai narasumber. Dalam penelitian ini menentukan informan dengan menggunakan teknik purposive, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu, yang benar-benar mengetahui tentang Efektivitas Program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) UMKM di Diskoperindag Kabupaten Sumedang. Maka yang dijadikan informan adalah sebagai berikut.

Tabel 2. Subjek Penelitian

No.	Unsur/Jabatan	Jumlah
1.	Sekretaris Dinas	1
2.	Kepala Bidang UMKM	1
3.	Seksi fungsional Pengembangan Kewirausahaan	1
4.	Seksi fungsional	1
Jumlah		4

Data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi fakta-fakta atau informasi tentang Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Sumedang. Oleh karena itu, diperlukan rincian data yang dikumpulkan berupa data primer maupun sekunder. Definisi data primer adalah data yang langsung diamati dilapangan melalui wawancara mendalam. Sedangkan data sekunder adalah data yang sudah diolah dan dipublikasikan dari dokumen dan media pemberitaan resmi. Teknik pengumpulan data menurut Sugiyono (2020: 63), merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Oleh karena itu, dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang diperoleh dari berikut data ini:

1. Studi Kepustakaan yang dilakukan peneliti melalui sumber-sumber yang akurat dari buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
2. Studi Lapangan yaitu pengumpulan data secara langsung dengan meneliti secara mendalam yang menjadi fokus permasalahan dalam penelitian ini, dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:
 - a. Observasi, yaitu pengamatan yang dilakukan secara langsung ke lapangan mengenai objek yang diteliti, dengan tujuan untuk lebih memahami dan mendalami masalah-masalah yang terjadi.
 - b. Wawancara, yaitu mengadakan aktivitas tanya jawab secara langsung dengan koresponden (pihak-pihak yang terkait dalam penelitian).
 - c. Dokumentasi, yaitu pencatatan suatu objek yang diteliti serta diolah, sehingga menjadi sekumpulan barang bukti yang dapat ditampilkan apabila dibutuhkan. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, suara.

Triangulasi yang diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data. Triangulasi teknik, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Peneliti menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam dan dokumentasi untuk sumber yang sama secara serempak. Triangulasi sumber berarti, untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama. Tujuan dari triangulasi bukan untuk mencari kebenaran tentang beberapa fenomena, tetapi lebih pada peningkatan pemahaman peneliti terhadap apa yang ditemukan.

3. RESULTS AND DISCUSSION

Efektivitas program merupakan sebuah tolak ukur dalam membandingkan apakah sebuah rencana dan proses dalam rencana tersebut selaras dengan tujuan yang ingin dicapai. Ketika sebuah rencana dan prosesnya mencapai tujuannya maka sebuah program tersebut dapat dikatakan sebagai program yang efektif. Efektivitas sendiri dapat menilai sejauhmana suatu program dapat berperan terhadap tujuan yang ingin dicapai, semakin banyak pengaruh program yang dihasilkan demi mencapai tujuan maka semakin besar nilai yang dimiliki efektivitas tersebut.

Program pembinaan UMKM merupakan suatu kebijakan yang diatur dalam undang-undang. Studi tentang kebijakan telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari administrasi publik. Suatu kebijakan memuat dengan adanya organisasi antara pelaku organisasi pemerintah yang berusaha melakukan tindakan nyata untuk mencapai tujuan pemerintah dalam memecahkan suatu persoalan. Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang mempunyai peran yang sangat penting dalam keberhasilan program pembinaan UMKM di Kabupaten Sumedang.

Dalam hal ini, peneliti ingin memahami bagaimana efektivitas program bantuan produktif usaha mikro (BPUM) di Dinas Koperasi, UKM, perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang dengan

menggunakan teori ukuran efektivitas program menurut Budiani (Khadafi dan Mutiarin, 2017:334), yaitu sebagai berikut:

- a. Ketepatan sasaran program
- b. Sosialisasi program
- c. Tujuan program
- d. Pemantauan program

Berikut adalah hasil penelitian yang telah dilakukan, Efektivitas Program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) UMKM di Diskoperindag Kabupaten Sumedang adalah sebagai berikut:

1. Ketepatan sasaran program, di dalam dimensi ini terdapat dua indikator yaitu, kelompok sasaran dan pendapatan kelompok sasaran. Sasaran UMKM terhadap cara seleksi untuk menentukan kelompok sasaran BPUM yaitu dengan cara memastikan data masyarakat calon penerima BPUM memenuhi kriteria yang sudah ditentukan. Serta melakukan survey kelapangan oleh petugas survey. Pendataan program ini sudah dilaksanakan dengan baik dan sudah berjalan sesuai dengan susunan program yang telah ditetapkan sebelumnya, karena tim survey yang turun langsung kelapangan yang membantu melaksanakan pendataan calon penerima BPUM UMKM ini.
2. Sosialisasi Program, di dalam dimensi ini terdapat dua indikator yaitu, waktu sosialisasi dan informasi mengenai program. Waktu sosialisasi program BPUM UMKM sudah dilakukan dengan baik dan sebaik mungkin, dilingkungan Kabupaten Sumedang pelaksanaan dengan cara *door to door* dan via *whatsapp*. Manfaat pelaksanaan program BPUM UMKM adalah terfasilitasinya modal usaha bagi para pelaku UMKM, memajukan usaha kecil masyarakat, dan menambah permodalan usaha pelaku UMKM.
3. Tujuan Program, di dalam dimensi ini terdapat dua indikator yaitu, kurun waktu dan target sasaran yang konkrit. Kurun waktu pemberian bantuan UMKM yang dilaksanakan sudah baik, karena adanya waktu yang pasti dan teratur. Targer sasaran yang konkrit dalam pelaksanaan BPUM UMKM sebelum melaksanakan kegiatannya dilakukan pemeriksaan data bukti fisik terkait pelaksanaan yang dilakukan dan diberikan pengarahan oleh pendamping kepada peserta sudah baik.
4. Pemantauan Program, di dalam dimensi ini terdapat dua indikator yaitu, pengawasan program dan pemantauan program. Kegiatan pengawasam program ini dilakukan kepada para pelaku usaha yang mendapatkan BPUM didampingi secara langsung oleh staff Dinas Koperasi dan UMKM Kota Sumedang. Untuk pemantauan program sudah bisa dibilang baik. Kegiatan pemantauan program ini dilakukan kepada para pelaku usaha yang mendapatkan BPUM didampingi secara langsung oleh staff Dinas Koperasi dan UMKM Kota Sumedang.

Efektivitas program merupakan sebuah tolak ukur dalam membandingkan apakah sebuah rencana dan proses dalam rencana tersebut selaras dengan tujuan yang ingin dicapai. Ketika sebuah rencana dan prosesnya mencapai tujuannya maka sebuah program tersebut dapat dikatakan sebagai program yang efektif. Efektivitas sendiri dapat menilai sejauhmana suatu program dapat berperan terhadap tujuan yang ingin dicapai, semakin banyak pengaruh program yang dihasilkan demi mencapai tujuan maka semakin besar nilai yang dimiliki efektivitas tersebut. Sebagaimana menurut Makmur (2015:6) bahwa "Efektivitas program merupakan kegiatan yang pelaksanaannya menampakkan ketepatan antara harapan yang kita inginkan dengan hasil yang dicapai, dimana ditunjukkan dengan ketepatan harapan, implementasi, dan hasil yang dicapai.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh Kesimpulan bahwa efektivitas program BPUM UMKM di Diskoperindag Kabupaten Sumedang sudah terlaksana dengan baik dilihat dari kelompok yang berhasil dicapai, pendataan kelompok sasaran sudah dilaksanakan sesuai dengan apa yang diharapkan, waktu sosialisasi program sudah dibilang baik. Namun tetap saja terdapat hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan Bantuan produktif usaha mikro di Kabupaten Sumedang yaitu, dari pihak penyelenggara program sehingga masih ada penyimpangan, pada saat sosialisasi ada ketidakjelasan informasi yang disampaikan, sasaran program yang kurang tepat juga dari aspek ekonomi sasaran berjalan secara efektif. Terdapat upaya-upaya untuk mengatasi hambatan dalam efektivitas program Bantuan produktif usaha mikro yaitu, dengan cara melakukan sosialisasi yang dilakukan oleh penyelenggara program agar pemahaman mengenai BPUM UMKM berjalan secara optimal, dan semaksimal mungkin dengan memberikan dan meningkatkan hal apa yang menjadi pengambatnya

4. CONCLUSION

Pelaksanaan Efektivitas Program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) UMKM di Diskoperindag Kabupaten Sumedang sudah dilaksanakan sesuai dengan ukuran-ukuran efektivitas program. Program BPUM UMKM tersebut bisa dikatakan sudah efektif karena berjalan sesuai dengan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha mikro, kecil, dan Menengah dengan dasar kriteria jumlah asset dan omzet. 2. Faktor penghambat pelaksanaan Efektivitas Program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) UMKM di Diskoperindag Kabupaten Sumedang yaitu: Dari pihak penyelenggara program sehingga masih ada penyimpangan, dalam penerapan program ini pihak penyelenggara belum bekerja secara optimal, belum baik dan masih ada beberapa hambatan dari pihak penyelenggara program juga. Pada saat sosialisasi ada ketidakjelasan informasi yang disampaikan, kegiatan pelaksanaan sosialisasi program terhadap beberapa ketidakjelasan dan hambatan yang terjadi saat sosialisasi dilakukan, hambatannya kurangnya fasilitas media online untuk konsultasi permasalahan dari pihak KPM. Sasaran program yang kurang tepat juga dari aspek ekonomi sasaran masih ada hambatan yang membuat pengimplementasian yang dilaksanakan tidak berjalan secara efektif. Upaya-upaya dalam mengatasi hambatan Efektivitas Program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) UMKM di Diskoperindag Kabupaten Sumedang yaitu: Upaya yang dilakukan oleh pihak penyelenggaraan program yaitu dengan cara memberikan wewenang kepada koordinator UMKM agar tidak terjadi penyimpangan pada saat pelaksanaan program. Meningkatkan penyampaian informasi secara langsung melalui sosialisasi dan memberikan sosialisasi secara online untuk mempermudah informasi tentang BPUM UMKM. Untuk upaya penyampaian informasi dilakukan dengan sosialisasi secara langsung oleh koordinator UMKM. Hal yang dilakukan untuk meningkatkan ketepatan sasaran yaitu dilakukan pengecekan oleh koordinator UMKM melalui validasi dan verifikasi agar tepat sasaran dan memang layak menjadi sasaran program BPUM UMKM.

REFERENCES

- Aprillita, Dwi. 2019. Efektivitas Program PERPUSERU Dalam Mengembangkan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Lubuklinggau. Skripsi. Palembang: Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
- Budiani, Ni Wayan, 2007. Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna”Eka Taruna Bhakti”. Denpasar; Jurnal Ekonomi dan Sosial Input. Volume 2 No.1
- Faisal, Sanapiah. 1990. Penelitian Kualitatif (dasar-dasar dan aplikasi). Malang: Ya3 Malang Julia. 2020. Efektivitas Program. Jakarta, Abdul Kadir
- Khadafi, Mutiarin. (2017). *Efektivitas Program Bantuan Keuangan Khusus dalam Mengetahui Kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul*. Journal Governance and Public Policy. 334-335
- Makmur. 2011. Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan. Bandung: PT Refika Aditama.
- Mardiasmo (2017: 134), pengertian efektivitas adalah: “Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya”.
- Miles, matthew B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2020) *Qualitative data Analysis “a methods sourcebook.”* United States Of Amerika: SAGE Publications
- Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2020. Metode Penelitian Administrasi Metode R&D. Bandung: Alfabeta
- Suyanto, Y. (2014:92). Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Jakarta: PT. Gramedia.
- Syarifah, E. (2021). Efektivitas penyaluran dana BANPRES produktif usaha mikro (BPUM) untuk modal kerja dalam meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM (studi kasus pada pelaku UMKM di Desa Melayu) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Kalimantan MAB).